

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia dijuluki sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau, memiliki kekayaan sumber daya alam dan keindahan alam yang menawan. Meskipun demikian, Indonesia terletak di wilayah yang rawan terhadap bencana alam, dan penyebab kejadian tersebut terkait erat dengan keadaan geografis, hidrologi, demografi, dan sosiologis negara tersebut. Akibatnya, Indonesia diklaim rentan terhadap bencana sosial, alam, dan non-alam. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di tempat bertemunya empat lempeng tektonik: benua Pasifik, India, Australia, dan Asia<sup>1</sup>.

Wilayah Indonesia memiliki potensi rawan bencana yang sangat tinggi, karena disebabkan oleh wilayah Indonesia yang dilalui oleh Cincin Api Pasifik (Sirkum Pasifik), yang berisiko terjadinya gempa bumi, gunung berapi dan aktivitas vulkanis lainnya. Indonesia mempunyai iklim tropis hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa, Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa juga menyebabkan rawan terhadap bencana karena mempunyai risiko terjadinya badai, topan, banjir, dan tanah longsor. Bencana alam diartikan sebagai peristiwa yang dapat memberikan ancaman setiap saat dan menimbulkan

---

<sup>1</sup> BNPB, Potensi Ancaman Bencana, <https://www.bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana> diakses pada tanggal 8 Juni 2024, pukul 21:34 WIB

kerusakan terhadap lingkungan. Bencana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai rangkaian peristiwa yang membahayakan dan mengganggu perekonomian dan kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik alami maupun nonalami, serta menimbulkan korban jiwa, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis.

Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tornado, dan bencana alam lainnya merupakan contoh bencana alam yang disebabkan oleh alam, sedangkan bencana alam yang disebabkan oleh manusia meliputi banjir, kebakaran hutan, wabah penyakit, dan lain-lain. Banjir merupakan bencana non-alam yang sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Berikut ini informasi terkait bencana yang telah terjadi di Indonesia selama tiga tahun terakhir:



**Tabel 1.1**

**Bencana Alam Di Indonesia**

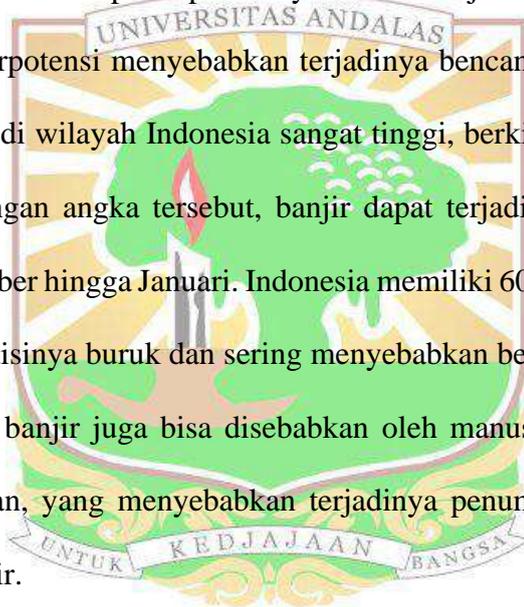
No	Bencana	2021	2022	2023	Jumlah
1.	Banjir	1196	598	349	2143
2.	Cuaca ekstrem	57	20	4	81
3.	Kekeringan	838	650	326	1814
4.	Kebakaran hutan	15	43	41	99
5.	Letusan gunung api	3	4	1	8
6.	Tanah longsor	1038	884	430	2352
Jumlah		3147	2199	1151	6497

*Sumber: Data informasi bencana Indonesia BNPB 2025*

Berdasarkan Tabel 1.1 dari beberapa bencana yang ada dalam waktu 3 tahun terakhir, bencana banjir dan tanah longsor merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia. Walaupun terjadi penurunan angka pada bencana banjir dan tanah

longsor, tetapi pada tahun 2023 angka kejadian bencana banjir dan tanah longsor masih tinggi dibandingkan dengan bencana lainnya. Longsor didefinisikan sebagai proses Bergeraknya massa tanah atau batuan karena gaya gravitasi, dan terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara gaya penahan dan gaya penggerak yang bekerja pada lereng. Banjir adalah peristiwa terendamnya daratan yang biasanya kering karena volume air di suatu badan air meningkat. Hujan deras atau aliran air yang berlebihan di suatu tempat dapat menyebabkan banjir.

Curah hujan berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor dan banjir. Curah hujan di wilayah Indonesia sangat tinggi, berkisar antara 200-3000 mm per tahun. Dengan angka tersebut, banjir dapat terjadi pada musim hujan tepatnya bulan Oktober hingga Januari. Indonesia memiliki 600 sungai besar, yang sebagian besar kondisinya buruk dan sering menyebabkan bencana banjir<sup>2</sup>. Tidak hanya curah hujan, banjir juga bisa disebabkan oleh manusia yang membuang sampah sembarangan, yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah dan menyumbat aliran air.



Fenomena banjir yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2023 terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Ribuan rumah di lima kecamatan terendam banjir. Banjir yang terjadi di Cirebon disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi dan pasangannya air laut. Menurut sekretaris Daerah Kota Cirebon data yang terdampak banjir di Kota Cirebon adalah 17 ribu lebih jiwa dari 4.000 KK yang terdampak banjir, namun dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian bencana banjir ini<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Agung Hidayanto, "Pengetahuan Dan Sikap Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Banjir,"

<sup>3</sup> Tirto.id. Fakta-Fakta Banjir Cirebon dan Situasi Terkininya, <https://tirto.id/fakta-fakta-banjir-cirebon-dan-situasi-terkininya-gEkT> diakses pada tanggal 25 Juli 2024, pukul 20:55 WIB

Fenomena tanah longsor juga sering terjadi di Indonesia, pada tahun 2024 terjadi tanah longsor di Tana Toraja. Dua puluh penduduk setempat tewas akibat tanah longsor, desa yang awalnya ramai dan kehidupan yang normal tetapi semuanya hancur setelah peristiwa itu terjadi. Tana Toraja merupakan wilayah dengan risiko tanah longsor yang tinggi<sup>4</sup>.

Dari 38 jumlah provinsi yang ada di Indonesia salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan daerah rawan akan terjadinya banjir dan tanah longsor. Seiring dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebutkan bahwa Sumatera Barat sangat unik<sup>5</sup>. Hal ini disebabkan karena musim hujannya tidak ada perbedaannya dengan musim kemarau, jadi hampir sepanjang tahun mengalami hujan dan mengakibatkan potensi banjir dan longsor akan selalu ada.

Seiring dengan pernyataan Kepala BMKG, banjir dan longsor memang sering terjadi di Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan risiko bencana meningkat akibat kombinasi faktor alam dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Dikutip dari Mongabay, Khalid Saifullah mengatakan bencana ekologis di Sumatera Barat seperti banjir terjadi karena kerusakan lingkungan. Tutupan hutan di Sumatera Barat juga terus menurun akibat deforestasi untuk lahan pertanian, perkebunan, tambang, baik secara legal maupun ilegal. Menurut Komunitas

---

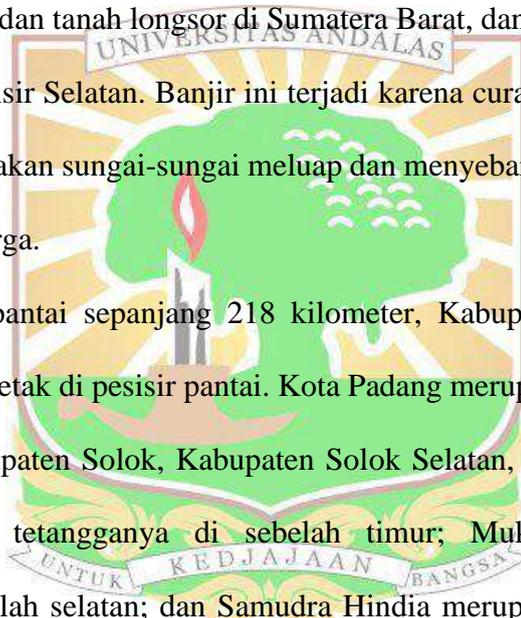
<sup>4</sup> BBC News Indonesia. Tanah Longsor di Tana Toraja menewaskan 20 warga, bagaimana cara antisipasi tanah longsor? <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgynrww334o> diakses pada tanggal 25 Juli 2024, pukul 21:10 WIB

<sup>5</sup> Tribun Padang, Ancaman Bencana di Sumbar Sepanjang Tahun, Kepala BMKG: Musim Hujan dan Kemarau Tidak Ada Perbedaan, <https://padang.tribunnews.com/2024/05/13/ancaman-bencana-di-sumbar-sepanjang-tahun-kepala-bmkg-musim-hujan-dan-kemarau-tidak-ada-perbedaan> diakses pada tanggal 8 Juni 2024, pukul 22:57 WIB

Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mencatat, pada tahun 2022 daerah Sumatera Barat kehilangan 27.447 hektar tutupan hutan, sehingga mengurangi kemampuan lahan menyerap air dan meningkatkan risiko banjir dan longsor<sup>6</sup>.

Mengenai kejadian banjir dan tanah longsor, pada awal tahun 2024 telah terjadi bencana banjir dan tanah longsor secara bersamaan, tepatnya di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang sering terjadi banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, dan hampir setiap tahun terjadi banjir di Pesisir Selatan. Banjir ini terjadi karena curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan sungai-sungai meluap dan menyebar ke permukaan jalan dan pemukiman warga.

Dengan garis pantai sepanjang 218 kilometer, Kabupaten Pesisir Selatan secara geografis terletak di pesisir pantai. Kota Padang merupakan tetangganya di sebelah utara; Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kerinci, dan Sungai Penuh merupakan tetangganya di sebelah timur; Mukomuko merupakan tetangganya di sebelah selatan; dan Samudra Hindia merupakan tetangganya di sebelah barat. Topografinya yang merupakan perpanjangan dari jajaran Bukit Barisan terdiri dari dataran, pegunungan, dan perbukitan. Topografi dan letak geografis Kabupaten Pesisir Selatan membuatnya sangat rentan terhadap banjir<sup>7</sup>. Bencana banjir dan tanah longsor merupakan bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut dapat dilihat data bencana di Kabupaten



<sup>6</sup> MONGABAY. Catatan Awal Tahun: Bencana Hantui Warga, Lingkungan Hidup Sumbar Makin Krisis. <https://www.mongabay.co.id/2023/01/10/catatan-awal-tahun-bencana-hantui-warga-lingkungan-hidup-sumbar-makin-krisis/> diakses pada tanggal 05 Desember 2024, pukul 15:33 WIB

<sup>7</sup> Wikipedia. Kabupaten Pesisir Selatan. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pesisir\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pesisir_Selatan). diakses pada tanggal 05 Desember 2024, pukul 15:39 WIB

Pesisir Selatan pada periode 2020-2022.

**Tabel 1.2**

**Data Kejadian Bencana Alam Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Bencana	2020	2021	2022	Jumlah
1	Tanah Longsor	15	25	29	69
2	Banjir	22	40	77	139
3	Kebakaran Hutan	2	8	37	47
4	Abrasi	0	5	5	10
Jumlah		39	78	148	265

*Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan*

Berdasarkan tabel diatas, banjir yang terus meningkat diakibatkan oleh peningkatan curah hujan, sistem drainase yang kurang memadai, dan daerah Pesisir Selatan yang dikelilingi jalur sungai maupun laut. Pada saat hujan terjadi dengan intensitas tinggi, air sungai akan meluap dan merambah ke daerah pemukiman. Sedangkan bencana tanah longsor meningkat karena kondisi topografi berbukit di wilayah Pesisir Selatan, serta intensitas hujan yang tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bencana banjir dan tanah longsor menjadi bencana yang sering terjadi di Pesisir Selatan.

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan terjadi pada Kamis 7 Maret 2024. Tingginya curah hujan dari siang hingga malam mengakibatkan bencana banjir terjadi di Pesisir Selatan. Hampir seluruh kecamatan yang berada di Pesisir Selatan terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan masa tanggap darurat pada 8 Maret 2024 lalu untuk 14 hari kedepan, yaitu hingga 22 Maret 2024<sup>8</sup>. Dikarenakan dampak banjir yang terjadi cukup besar, serta fokus

<sup>8</sup> KOMPAS.com, *Banjir Pesisir Selatan, Pemkab Perpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana*

pemerintah untuk melakukan pemulihan pasca bencana, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memperpanjang masa tanggap darurat hingga 5 April 2024.

Banjir dan tanah longsor yang terjadi secara bersamaan di Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Hal ini juga dibenarkan oleh Nikodemus El Tiaz, ST selaku Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan berikut ini:

“Penyebab banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan adalah curah hujan yang ekstrem, karena BMKG sudah merilis curah hujan diatas 184 mm” (Wawancara Nikodemus El Tiaz, ST selaku Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, pada 15 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa penyebab banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan benar terjadi karena curah hujan yang tinggi. Menurut BMKG jika curah hujan >150mm/hari dinyatakan sebagai hujan ekstrem. Tercatat 29 korban jiwa, 25 orang meninggal dunia dan ditemukan, 4 dinyatakan hilang, dan 74 ribu jiwa sempat mengungsi akibat hujan ekstrem pada hari Kamis, 7 Maret 2024. Tidak hanya pemukiman warga yang terdampak, akses jalan nasional juga terputus karena jalan terban dan jembatan rusak<sup>9</sup>. Berikut dapat dilihat terkait data curah hujan yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan:

---

hingga 5 April, [Banjir Pesisir Selatan, Pemkab Perpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana hingga 5 April \(kompas.com\)](#) diakses pada tanggal 24 Mei 2024, pukul 23.29 WIB

<sup>9</sup> MONGABAY, Pembalakan Liar, Penyebab Banjir Bandang di Pesisir Selatan, [Pembalakan Liar, Penyebab Banjir Bandang di Pesisir Selatan - Mongabay.co.id](#) diakses pada tanggal 24 Mei 2024, pukul 23.39 WIB

**Tabel 1.3**  
**Data Curah Hujan Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Bulan	Curah Hujan Menurut Bulan (mm)		
		2020	2022	2023
1	Januari	519,55	207,60	427,70
2	Februari	256,25	110,60	240,00
3	Maret	347,25	271,10	478,90
4	April	301,25	285,60	308,70
5	Mei	296,50	196,80	348,60
6	Juni	144,13	514,30	414,80
7	Juli	403,50	284,50	679,90
8	Agustus	77,25	340,80	552,70
9	September	473,36	639,20	103,80
10	Oktober	368,91	589,20	41,70
11	November	413,78	816,60	245,70
12	Desember	146,00	441,00	157,30
Jumlah		3.747,73	4.697,3	3.999,8

*Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan*

Tabel 1.3 diatas menunjukkan data mengenai curah hujan yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan. Curah hujan diartikan sebagai total debit air hujan yang turun di suatu wilayah alam kurun waktu tertentu. Berdasarkan data diatas dapat dilihat mengenai perbandingan jumlah curah hujan yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan pada tanggal 7-8 Maret tahun 2024, pada saat terjadi bencana banjir dan tanah longsor, hujan yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan dengan intensitas 320 mm, hal tersebut tergolong hujan ekstrem<sup>10</sup>. Curah hujan yang tinggi menyebabkan debit air melebihi kapasitas sungai, hal ini yang menjadi pemicu munculnya banjir, sedangkan curah hujan dapat menyebabkan jenuhnya tanah. Tanah yang jenuh air akan kehilangan kekuatan dan mudah runtuh yang

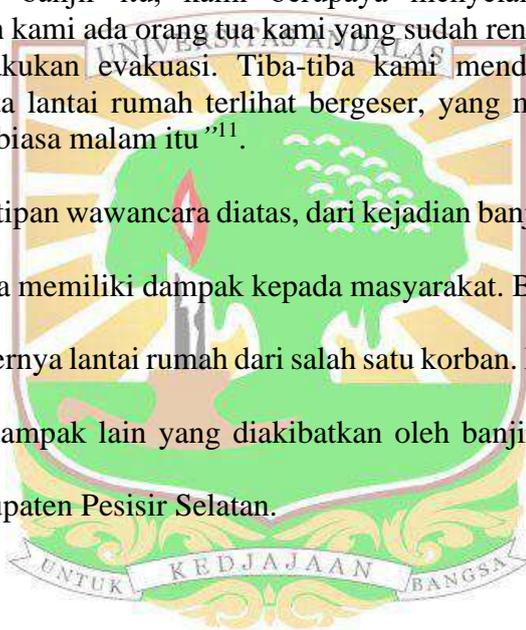
<sup>10</sup> [https://adinet.ahacentre.org/assets/uploads/supported\\_doc/20240313-Paparan-bansor-7-8-Maret-2024-\(Update-11-Maret-2024-jam-10.00-Wib\).pdf](https://adinet.ahacentre.org/assets/uploads/supported_doc/20240313-Paparan-bansor-7-8-Maret-2024-(Update-11-Maret-2024-jam-10.00-Wib).pdf).

membuat terjadinya tanah longsor.

Fenomena bencana banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh hujan yang ekstrem di Kabupaten Pesisir Selatan membuat masyarakat menjadi panik dan ketakutan. Selain itu dikutip dari portal berita Berita Pesisir Selatan Kab, salah seorang warga asal Bayang menjelaskan bagaimana terjadinya bencana yang menimpa keluarganya.

“Saat banjir itu, kami berupaya menyelamatkan diri, apalagi dirumah kami ada orang tua kami yang sudah rentan jadi agak sulit saat melakukan evakuasi. Tiba-tiba kami mendengar bunyi retakan, ternyata lantai rumah terlihat bergeser, yang menimbulkan kepanikan luar biasa malam itu”<sup>11</sup>.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, dari kejadian banjir dan tanah longsor yang terjadi tentunya memiliki dampak kepada masyarakat. Bentuk dampak yang nyata seperti bergesernya lantai rumah dari salah satu korban. Berikut dapat dilihat gambar mengenai dampak lain yang diakibatkan oleh banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan.



---

<sup>11</sup> PesisirSelatanKab.Go.Id. Bencana Banjir, Anggota DPR-RI Serahkan Bantuan di Bayang dan Lengayang. <https://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/bencana-banjir-anggota-dpri-serahkan-bantuan-di-bayang-dan-lengayang> diakses pada tanggal 27 Juli 2024, pukul 00:18 WIB

**Gambar 1.1**  
**Dampak Banjir & Tanah Longsor**



*Sumber: Dokumentasi langgam.id, Tahun 2024*

Berdasarkan gambar 1.1 terlihat bahwa dampak dari bencana mengakibatkan putusnya jalan nasional, serta jalan lintas antara Sumatera Barat dan Bengkulu. Dari dampak tersebut masyarakat merasakan kesulitan dalam menjalankan aktivitas seperti biasa. Karena adanya lumpur dan kayu yang disebabkan oleh longsor dan terbawa oleh banjir ke pemukiman masyarakat. Terdapat kerusakan rumah yang ditimbulkan akibat bencana banjir yang disertai dengan longsor. Berikut dapat dilihat mengenai data jumlah rumah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor:

**Tabel 1.4**  
**Rumah Terdampak Bencana Banjir & Tanah Longsor Tahun 2024**

No	Kecamatan	Kategori Rusak			Jumlah
		Ringan	Sedang	Berat	
1	Koto XI Tarusan	473	366	86	925
2	IV Nagari Bayang Utara	2	1	1	4
3	Bayang	456	278	30	764
4	IV Jurai	914	92	67	1,073
5	Batang Kapas	6	126	26	158
6	Sutera	807	485	127	1,419
7	Lengayang	1,472	106	83	1,661
8	Ranah Pesisir	172	25	4	201
9	Linggo Sari Baganti	2,765	1,274	115	4,154
10	Airpura	-	1	1	2
11	Pancung Soal	-	-	2	2
12	Basa Ampek Balai Tapan	-	-	-	-
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	2	-	2	4
14	Silaut	11	-	-	11
Total		7,080	2,754	544	10,378

*Sumber: Dokumen BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024*

Berdasarkan tabel 1.5 dapat dilihat mengenai kerusakan yang disebabkan oleh banjir dan tanah longsor. Kerusakan dinilai menjadi tiga kategori, yaitu rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Rumah masyarakat yang dulunya berdiri kokoh, kini menjadi hancur diterjang air banjir dan material longsor. Banjir dan tanah longsor menyebabkan kerugian bagi masyarakat, terutama dalam hal infrastruktur, adanya korban jiwa, dan perekonomian masyarakat yang rusak. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab atas upaya penanggulangan bencana.

Penanggulangan bencana merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, yang mencakup serangkaian langkah sebelum, selama, dan setelah bencana. Hal ini termasuk kedalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana. Pemerintah juga harus memastikan pemulihan terhadap masyarakat yang terdampak oleh bencana alam.

Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah diberikan kewenangan untuk memastikan penanggulangan bencana secara efektif dan efisien mulai dari tahap pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana<sup>12</sup>. Tujuan dari manajemen bencana adalah untuk menurunkan risiko bahaya agar tercipta kehidupan yang aman. Program mitigasi bencana, yang melibatkan peningkatan kesadaran dan kewaspadaan sejak awal sebelum bencana terjadi, dapat membantu mencegah bahaya. Untuk mencegah bencana pada periode prabencana, sektor publik, swasta, dan masyarakat harus bekerja sama dalam manajemen bencana<sup>13</sup>.

Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib membentuk lembaga penanggulangan bencana. Oleh karena itu dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas pokok yaitu untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pembangunan penanggulangan bencana, sedangkan fungsinya yaitu<sup>14</sup>:

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

<sup>14</sup> Dokumen Laporan Kinerja ( LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik
3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan administrasi dinas
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan salah satu tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini sesuai dengan Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Peraturan BNPB Nomor 11 Tahun 2008. Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai acuan atau panduan bagi penyelenggara rehabilitasi, menjamin ketertiban dan efisiensi penyelenggaraan, serta menjamin tercapainya tujuan rehabilitasi.

Rehabilitasi merupakan bentuk pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan tujuan utama untuk menormalisasikan semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana<sup>15</sup>. Sedangkan rekonstruksi diartikan sebagai suatu bentuk perumusan kebijakan dan upaya serta langkah nyata yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen seluruh prasarana dan sarana serta sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintah maupun

---

<sup>15</sup> Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ayat 1 Pasal 10 dan Pasal 11 tentang Penanggulangan Bencana. Sasaran utama rekonstruksi adalah menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan, kegiatan sosial budaya, tegaknya hukum, serta tumbuhnya peran serta masyarakat dalam kehidupan seluruh masyarakat di wilayah pascabencana. Ruang lingkup rekonstruksi meliputi program-program baik rekonstruksi fisik maupun rekonstruksi nonfisik.

Rehabilitasi dan rekonstruksi perlu untuk dibahas dalam pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor karena kedua aspek ini merupakan komponen penting dalam memastikan pemulihan yang berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi dan psikologis masyarakat. Tanpa rehabilitasi yang terencana, korban bencana akan terus berada dalam situasi rentan, baik dari sisi kesehatan, pekerjaan dan keseimbangan sosial. Sementara rekonstruksi berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang terkena dampak banjir. Proses ini tidak hanya memperbaiki yang rusak tetapi juga memastikan infrastruktur yang dibangun lebih tangguh terhadap bencana.

Tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pemulihan adalah membuat laporan kejadian. Seperti yang diungkapkan oleh Nikodemus El Tiaz, ST selaku Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan berikut ini:

“Tugas utama BPBD untuk pemulihan ini adalah terdapat laporan kejadian. Jadi BPBD wajib melaporkan kejadian bencana. Setelah membuat laporan kejadian, baru setelah itu ada pendataan. Pendataan cepat itu yang dicari adalah nilai kerusakan, nilai kerugian, misalnya jembatan putus, berapa nilai kerusakannya. Setelah itu nilai kerugian, misalnya jembatan putus, masyarakat

yang beraktifitas ke pasar, sekolah dalam perjalananya melewati jalan memutar/tidak jalan biasa yang dilewati” (Wawancara Nikodemus El Tiaz, ST selaku Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, pada 15 Juli 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara dapat diketahui bahwa BPBD Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas utama dalam pemulihan pasca bencana dengan membuat laporan kejadian. Laporan kejadian berupa penyampaian informasi yang berisi fakta bencana yang telah terjadi. Data bencana yang didapat berupa nilai kerusakan dan nilai kerugian yang akan dihitung, laporan kejadian ini bisa melihat berapa kerugian yang ditimbulkan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat urutan langkah-langkah yang jelas dari pelaporan, pendataan, hingga penilaian kerugian. Tugas utama BPBD Kabupaten Pesisir Selatan yang sistematis dalam penanganan bencana, memastikan setiap tahap yang dilakukan dalam proses pemulihan pasca bencana berjalan dengan efisien didukung oleh data yang akurat dan pemahaman yang jelas tentang dampak bencana terhadap masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bentuk pemulihan pada pasca bencana, bentuk penjelasan terkait teknis yang dijelaskan oleh Nikodemus El Tiaz, ST selaku Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan berikut ini:

“Teknis yang dilakukan seperti membuat pos komando, pos komando ada sesinya. Seperti sesi evakuasi, logistik, sesi dapur umum, sesi kebersihan dan lengkap semuanya di pos komando, yang telah diatur oleh aturan BNPB. Termasuk kominfo untuk konferensi pers berita setiap hari, misalnya telah ditemukan korban yang telah di evakuasi status orang hilang, dan lainnya. Wajib setiap hari meng update berita yaitu pekerjaan kominfo dan bagian humas. Kominfo juga terlibat dalam pos komando” (Wawancara Nikodemus El Tiaz, ST

selaku Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, pada 15 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara diketahui dalam pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitas dan rekonstruksi dalam pemulihan pasca bencana yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, upaya yang telah dilakukan oleh BPBD adalah melakukan evakuasi pada saat bencana banjir dan tanah longsor terjadi. Evakuasi yang dilakukan berupa penyelamatan korban bencana dan mencari korban yang hilang. Sedangkan sesi dapur umum yang dimaksud seperti membuat dapur bersama pada saat kejadian bencana dan memasak makanan untuk korban yang terdampak. Selain itu pasca terjadi bencana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan membuat teknis kebersihan, seperti membersihkan sekolah yang terkena lumpur dan lainnya.

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan sebuah strategi yang matang untuk diimplementasikan ke lapangan supaya berjalan dengan baik. Strategi diartikan sebagai hasil dari suatu pemikiran seseorang terhadap analisis obyek yang disebabkan oleh sesuatu yang ingin dicapai. Strategi juga disebut sebagai sebuah perencanaan untuk dapat meraih sesuatu<sup>16</sup>. Strategi disusun berdasarkan analisis situasi, identifikasi tujuan, serta pemahaman mengenai sumber daya yang tersedia dan tantangan yang akan dihadapi.

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor hanya berpedoman

---

<sup>16</sup> Hazin, B. I. (2024). Pengertian Strategi. *Pengembangan Kurikulum: Teori, Model, dan Praktik*, 240.

kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh BNPB, karena BPBD harus mengikuti regulasi dari BNPB. Regulasi tersebut tertuang pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana<sup>17</sup>. Pada Bab 3 dan Bab 4 dalam peraturan tersebut terdapat bentuk strategi serta penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Salah satu permasalahan strategi yang dihadapi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan berkaitan dengan implementasi kebijakan yang tercantum dalam dokumen strategi BNPB, khususnya Pasal 7 ayat 3 poin b yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar dana untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari BNPB dan Pemerintah Pusat. APBD tidak memiliki peran yang cukup besar dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya APBD Kabupaten Pesisir Selatan belum sanggup dan masih terbatas dalam kebutuhan membentuk pedoman atau kajian-kajian awal terkait dengan proses pemulihan pasca bencana, sehingga BPBD dan beberapa OPD terkait yang melakukan tugas dalam pemulihan ini menjadi tidak tahu apa yang harus dikerjakan karena tidak adanya pedoman yang jelas dalam proses pemulihan tersebut.

“Kendala BPBD adalah belum memiliki dokumen penanggulangan bencana secara lengkap, akibatnya kalau tidak ada sebuah acuan atau pedoman apabila terjadi bencana beberapa OPD yang terlibat dalam penanggulangan bencana jadi tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Untuk kedepannya BPBD Kabupaten Pesisir Selatan harus ada perencanaan dari awal, bukan setelah bencana

---

<sup>17</sup> Peraturan BNPB RI Nomor 06 Tahun 2017

terjadi” (Wawancara Nikodemus El Tiaz, ST selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, pada 15 Juli 2024).

Terlihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, tidak adanya kajian-kajian dari dulu tentang proses pemulihan pasca bencana, sehingga dalam proses pemulihan semua yang terlibat sangat kesulitan untuk mengeksekusi di lapangan, mereka tidak tahu langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan. Ketiadaan dokumen penanggulangan bencana yang lengkap di lingkungan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan lemahnya sistem manajemen risiko bencana yang berbasis pada perencanaan.

Melihat dari beberapa penelitian terkait strategi BPBD dalam melakukan perbaikan setelah terjadi bencana yaitu penelitian yang dilakukan oleh Risteruw Leonardo Firmansyah, dkk (2023) mengenai “Analisis Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Kabupaten Cianjur”<sup>18</sup>. Pada penelitian ini menekankan bahwa dibutuhkan strategi yang tepat, namun faktanya terdapat kendala seperti penanganan yang lambat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat darurat dan pasca bencana. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Ayu Cahya Ningsih (2022) mengenai “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pasca Bencana Alam Di Kabupaten Luwu Utara”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan BPBD dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang, serta faktor-faktor yang menghambat

---

<sup>18</sup> Firmansyah, R. L., Nurcahya, S. B., & Mariany, A. (2023). Analisis Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Kabupaten Cianjur. *Jurnal Sosio dan Humaniora (SOMA)*, 2(1), 154-166.

pemanfaatannya dalam upaya tersebut di Kabupaten Luwu Utara.

Proses pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor perlu dilakukan secepat mungkin. Salah satu yang menjadi fokus adalah putusnya jalan utama Pesisir Selatan di Kecamatan Koto XI Tarusan, sehingga akses untuk pendistribusian bantuan kepada korban bencana terhalang. Hal ini membuat BPBD harus bekerjasama dengan instansi terkait termasuk pemerintah dalam proses percepatan pemulihan bencana.

**Gambar 1.2**



Berdasarkan gambar 1.2, jalan yang terputus di Kecamatan Koto XI Tarusan sudah dalam proses pengerjaan pembangunan ulang jalan. Pembangunan jalan ini merupakan hasil koordinasi serta kerjasama yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dengan pemerintah daerah, dan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, sehingga bantuan bisa disalurkan dengan cepat. Ini merupakan salah satu bentuk rekonstruksi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor.

Sementara itu, dalam proses rehabilitasi pasca bencana banjir dan tanah

longsor, rumah yang mengalami rusak berat akan direnovasi oleh pemerintah sesuai arahan Menteri PUPR<sup>19</sup>. Instruksi ini langsung didukung oleh dana dari BNPB, yang akan menurunkan anggaran bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah, yaitu Rp 60 juta untuk kerusakan berat, Rp 30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp 15 juta untuk kerusakan ringan. Secara keseluruhan, 1.240 rumah akan direnovasi menggunakan anggaran sebesar Rp 37,8 miliar. Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan akan berfokus pada perencanaan teknis, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan yang rusak. Dinas sosial akan fokus pada identifikasi kebutuhan sosial korban bencana, serta pemerintah kecamatan dan nagari membantu mendistribusikan informasi, dan memfasilitasi komunikasi antara masyarakat terdampak dengan pemerintah<sup>20</sup>.

Pada pemulihan pasca bencana, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan perlu membahas upaya yang dilakukan dalam pengimplementasian strategi. Hal pertama yang harus dikaji adalah diagnosis, misalnya dengan mengidentifikasi penyebab awal terjadinya banjir dan tanah longsor, serta melihat tantangan kedepan dalam pemulihan. Selanjutnya adalah kebijakan penuntun, yang membahas tentang hasil diagnosis setelah turun lapangan, sehingga BPBD Kabupaten Pesisir Selatan bisa menentukan kebijakan atau aturan apa yang digunakan pada saat pemulihan bencana. Langkah terakhir yang dilakukan adalah BPBD Kabupaten Pesisir Selatan

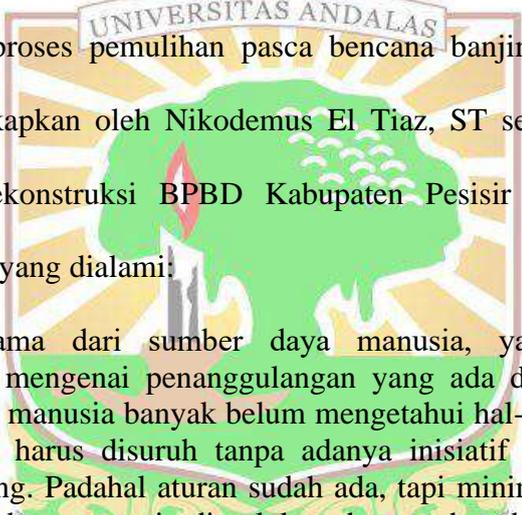
---

<sup>19</sup> Suarasumbar.id. Rumah Rusak Berat Akibat Banjir dan Longsor Pessel Akan Direnovasi Pemerintah. [Rumah Rusak Berat Akibat Banjir dan Longsor Pessel Akan Direnovasi Pemerintah](#). diakses pada tanggal 13 Desember 2024, pukul 18:18 WIB

<sup>20</sup> Infobanua. Pembangunan Rumah Korban Banjir di Pessel Bakal Segera Dimulai, Warga Sambut Dengan Haru Kebahagiaan. [Pembangunan Rumah Korban Banjir di Pessel Bakal Segera Dimulai, Warga Sambut Dengan Haru Kebahagiaan – infobanua.co.id](#). diakses pada tanggal 13 Desember 2024, pukul 18:22 WIB

harus melakukan tindakan dengan cepat dan tepat sesuai dengan hasil kebijakam yang telah disepakati, sehingga proses pemulihan bencana banjir dan tanah longsor bisa berjalan dengan baik.

Peneliti berasumsi bahwa BPBD Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kesulitan dalam pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor. Hal ini dikarenakan dampak yang diakibatkan oleh banjir dan tanah longsor sangat besar, sehingga perlunya strategi yang matang untuk diaplikasikan di lapangan. Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi tanda tanya, apakah bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam proses pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor. Seperti yang diungkapkan oleh Nikodemus El Tiaz, ST selaku Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan berikut ini mengenai tantangan yang dialami:



“Pertama dari sumber daya manusia, yaitu banyak keterbatasan mengenai penanggulangan yang ada dan regulasi. Sumber daya manusia banyak belum mengetahui hal-hal tersebut. Jadi apa-apa harus disuruh tanpa adanya inisiatif dari pribadi masing-masing. Padahal aturan sudah ada, tapi minim membaca. Jadi sumber daya manusia diperlukan dan sumber daya manusia harus tangguh. Nah tangguh itu yang jarang sekarang, misalnya dari 10 orang, 1 yang memahami, 9 yang tidak, hal tersebut yang membuat repot. Kedua dari finansial juga mengalami keterbatasan, contoh membeli minyak mobil tidak bisa karena dana tidak ada. Aturannya BNPB dan BPBD dipisahkan dengan dinas-dinas lain. Untuk kejadian bencana sebenarnya aturannya ada, cuman disini jarang diberlakukan karna oknum, banyak sumber daya manusia yang salah, aturannya sudah benar” (Wawancara Nikodemus El Tiaz, ST selaku Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, pada 15 Juli 2024).

Dapat dilihat dari hasil wawancara diatas, bahwa BPBD memiliki kesulitan karena adanya kendala mengenai sumber daya manusia. Pada pemulihan pasca

bencana tentunya banyak dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukan evakuasi, rehabilitas, dan rekonstruksi. Strategi dalam pemulihan ini melibatkan sumber daya manusia yang ahli, maka dalam hal ini sumber daya manusia yang kompeten sangat dibutuhkan, tetapi faktanya sumber daya manusia yang menjadi kendala akibat keterbatasan pengetahuan dan inisiatif. Kendala selanjutnya mengenai finansial, bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan banyak menimbulkan kerugian dan kerusakan. Maka dari itu finansial sangat dibutuhkan, karena APBD Kabupaten Pesisir Selatan tidak mencukupi dan anggaran dana dari BPBD sendiri tidak cukup.

Adanya keterbatasan anggaran tadi, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan upaya berupa mengusulkan proposal untuk mendapatkan dana siap pakai (DSP), yang terdiri dari dana siap pakai infrastruktur dan stimulan rumah masyarakat. Dana ini bermanfaat untuk menunjang pembangunan terhadap infrastruktur yang rusak yang disebabkan oleh bencana. Sedangkan untuk dana stimulan rumah diberikan kepada masyarakat yang rumahnya rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor. Berikut juga dijelaskan terkait dana siap pakai yang diterima oleh Kabupaten Pesisir Selatan:

Dana siap pakai terbagi menjadi dua yaitu dana DID atau infrastruktur di ajukan 53M disetujui 23 M, di ajukan 16 titik di setujui 8 titik. Setelah itu dana stimulan untuk rumah, kita mengajukan kerusakan rumah dan adanya verifikasi oleh BNPB, itu rumah di kategori rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Untuk dana perbaikan infrastruktur itu ada perbaikan jalan, jembatan, dan lainnya. (Wawancara dengan Yuskardi, S.T., M.T selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, pada 10 Januari 2025).

Berdasarkan wawancara diatas, salah satu pemulihan yang sedang dilakukan berupa rehabilitasi dan rekontruksi infrastruktur. Terdiri dari pembangunan

pengamanan dan penguatan tebing sungai, perbaikan jembatan, perbaikan jalan, dan lainnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa melakukan kegiatan seperti biasa tanpa ada hambatan. Selain itu seperti pengamanan tebing sungai bermanfaat untuk mengurangi erosi yang disebabkan oleh aliran air yang kuat dan mengurangi risiko bencana. Sedangkan untuk dana siap pakai stimulan rumah masi pada tahap persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, untuk dananya sudah masuk dalam rekening tetapi belum bisa digunakan karena akun rekening masih terblokir.

Berdasarkan pemaparan fenomena bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, dampak yang dihasilkan cukup besar. Dengan melihat dampak akibat banjir dan tanah longsor serta merujuk kepada tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pemulihan Pasca Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan.

Diambilnya lokus penelitian ini karena wilayah Pesisir Selatan memiliki frekuensi bencana alam yang relatif tinggi. Kabupaten Pesisir Selatan sering kali menghadapi ancaman bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, yang menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur, lingkungan, dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan BPBD setempat dalam merespon dan memulihkan kondisi pasca bencana menjadi sangat penting untuk diteliti.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dirancang mengenai: “Bagaimana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pemulihan Pasca Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pemulihan Pasca Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan, khususnya Administrasi Publik, khususnya di bidang teknik manajemen pasca bencana. Oleh karena itu, peneliti berharap penelitian ini dapat membantu mahasiswa lain yang mempelajari Ilmu Administrasi Publik dengan menawarkan informasi dan perspektif baru.
2. Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai panduan bagi penelitian masa depan saat mereka mengembangkan temuan mereka.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, manfaat yang dirasakan dari penelitian ini yaitu

sebagai tempat pengembangan selama perkuliahan terutama mengenai ilmu manajemen publik.

2. Bagi instansi, temuan dari penelitian ini dapat memiliki nilai praktis yang signifikan dan dapat digunakan sebagai panduan terkait Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bagi pihak lain, sebagai bahan bacaan dan penambahan wawasan terkait strategi penanggulangan pasca bencana.

